PAJAK DIGITAL DAN PERANG DAGANG ANTARA PERANCIS DENGAN AS

Oleh: Rizki Hamri Pratama
rizki.hamri1628@student.unri.ac.id
Pembimbing : Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel
Daftar Pustaka : 9 Jurnal, 12 Buku, 66 Situs web
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya JL.HR. Soebrantas KM. 12,5
Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study discusses France's digital tax policy and the trade war between France and the United States (US) that emerged as a result of this policy. The digital tax policy requires digital-based companies with certain incomes operating in France to pay taxes to the French government. The US considered this policy as a discrimination towards US based digital companies and threatened to impose 100% import duties on French products. France's position to continue implementing its digital tax policy even though the US has threatened to increase tariffs on French products is the focus of this research

This research is an explanatory qualitative research that emphasizes on the depth of the data obtained by the researcher. The theory used to analyze the thesis case study is economic nationalism. The assumption of this theory is that the economy cannot be separated from politics. Mercantalism assumes that the state is the main actor who continues to strive to achieve the interests of the country by all means including economic means. Therefore, each country has a role to protect the interests of each country.

This study shows the reason why France continues to enforce its digital tax policy is because France wanted to increase the country's revenue from the digital economy activities. The support coming from other European Union countries has strenghtened France's position to carry out the digital tax policy.

.

Keyword: digital tax policy, economic nationalism, trade war, digital economy

PENDAHULUAN

Fenomena ekonomi digital merupakan fenomena yang lahir dari kemajuan teknologi yang menghadirkan internet. Banyak perusahaan multinasional atau MNC yang memanfaatkan internet dengan mengusung model bisnis yang menawarkan barang dan jasa dalam bentuk non fisik pada pelanggan mereka dengan harga yang murah dan dengan cara yang praktis.[1] Maka tidak heran beberapa perusahaan digital seperti Google, Amazon, Facebook dan Apple dapat meraup pendapatan yang lebih tinggi daripada PDB terbesar di Eropa yaitu Jerman sebesar $4 triliun.[2]

Salah satu permasalahan yang muncul dari perekonomian yang berbasis internet ini adalah mengenai penetapan pajak karena hingga saat ini sistem perpajakan masih mengandalkan kehadiran fisik yang digunakan sebagai dasar untuk subjek pajak.[3] Dan juga tidak ada regulasi khusus yang menjadi standar penetapan pajak digital

Pada Juli 2019, Perancis mengeluarkan kebijakan *Digital Service Tax* (DST) atau pajak digital sebesar 3% kepada perusahaan-perusahaan teknologi besar yang memiliki pendapatan sebesar 25 Juta Euro atau USD 28 juta.[4] Pajak digital ini dibuat untuk menyasar perusahaan digital yang memiliki pelanggan di Perancis. Penetapan pajak digital ini berarti tidak lagi memerlukan kehadiran fisik dari sebuah perusahaan untuk bisa dipungut pajak. DST ini tidak hanya menyasar perusahaan asing namun juga perusahaan domestik yang menerima pendapatan lebih besar dari ambang batas tertentu.[5]

Kebijakan ini mendapat respon negatif dari AS karena kebijakan ini dianggap diskriminatif kepada perusahaan digital AS yang berada di Perancis. Pada bulan Desember 2019 Presiden Donald Trump merespon kebijakan Perancis dengan mengancam akan mengenakan bea masuk pada produk-produk Perancis sampai dengan 100% atau senilai dengan USD 2,44 miliar.[6] Meskipun mendapatkan ancaman dari AS, Perancis tetap bertekad untuk melaksanakan pemungutan pajak pada perusahaan raksasa teknologi tersebut. Bahkan Perancis telah mengirimkan surat berupa tagihan pajak kepada perusahaan raksasa teknologi tersebut.

KERANGKA TEORI

Dalam melaukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen atau *document analysi*. Dalam penelitian penulis menggunakan teori nasionalisme ekonomi. Teori nasionalisme ekonomi beranggapan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dibuat suatu negara digunakan untuk membangun kekuatan negara yang lebih kuat. Teori ini juga beranggapan bahwa perdagang antar negara digunakan negara untuk mencapai sebuah kemakmuran serta suatu usaha yang digunakan untuk mengembangkan kekuasaan negara tersebut. Serta teori ini juga beranggapan bahwa perdagangan antar negara

---

[1]Febrianty dkk, *Manajemen Perubahan Perusahaan Di Era Transformasi Digital* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020). Hlm. 1.

[2]*Ibid.*

[3]Muhammad Aldrin Akbar, Sitti Nur Alam, *Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020). Hlm. 47

[4]Nora Galuh Candra, "Rincian Skema Pajak Digital Prancis yang Terpaksa Ditunda Karena AS," *DDTC News*, 21 Januari 2020 https://news.ddtc.co.id/rincian-skema-pajak-digital-prancis-yang-terpaksa-ditunda-karena-as-18499

[5]*Ibid.*

[6]Arif Budiansyah, "Gegara Pajak Digital, Trump Perang Dagang dengan Perancis," *CNBC Indonesia*, 3 Desember 2019 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191203103212-37-119832/gegara-pajak-digital-trump-perang-dagang-dengan-perancis

sebagai *zero-sum. Zero sum* ialah Keuntungan yang didapatkan merupakan kerugian yang dialami oleh pemain lain.[7] Dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan relatif saja.[8] Jika dilihat dalam praktiknya teori nasionalisme ekonomi ini menggunakan cara-cara yang menguntungkan negaranya seperti proteksionisme dalam bentuk tarif dan kuota suatu barang, serta peraturang untuk melarang suatu produk asing masuk ke pasar domestik negaranya, menetapkan bea masuk.[9]

FENOMENA EKONOMI DIGITAL

Istilah ekonomi digital muncul sejak tahun 1990-an, dimana ekonomi digital adalah merupakan sesuatu yang memanfaatkan teknologi digital pada sektor ekonomi seperti distribusi produk, mempromosikan produk serta penjualan produk.[10] Ekonomi Digital memiliki beberapa kelebihan. Pertama, banyaknya informasi pilihan yang didapatkan oleh pelaku pasar dalam hal produsen dan konsumen mendapatkan apa yang mereka inginkan dikarenakan banyaknya informasi. Yang kedua, tidak banyaknya waktu yang diperlukan dan yang ketiga, keberadaan ekonomi digital ini membuat tidak banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pengembang usaha karena pengembang usaha dapat mendirikan usahanya tanpa perlu mempunyai tempat jual seperti ruko dan konsumen yang dijangkau menjadi luas. Hal inilah yang membuat banyak berdirinya UMKM serta Perusahaan Multinasional berbasis Digital.[11]

Selain kelebihan ekonomi digital juga memiliki kekurangan yang Pertama, yaitu adanya monopoli pasar yang maksudnya bahwa ketika adanya seseorang pemilik modal besar atau perusahaan raksasa yang mendunia dengan jaringan yang luas membuat sulitnya para pelaku usaha ekonomi kecil untuk dapat menyainginya, dan dikarenakan kekuatan monopoli tersebut pemilik modal besar mampu memainkan harga pasar dengan mudah. Kedua, Ekonomi Digital selalu membutuhkan media seperti komputer atau mobile serta jaringan internet. Ketiga, ancaman terhadap data-data pribadi karena semuanya dapat mengakses data-data tersebut.[12]

Globalisasi ekonomi menyebabkan perdagangan dan investasi tidak lagi mengenal batas negara atau batas wilayah, sehingga banyak perusahaan-perusahaan di negara maju seperti Jepang dan negara di Eropa mengikuti kegiatan-kegiatan perusahaan Amerika. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan investasi maupun pengembangan usaha tidak hanya terfokus pada negara tempatnya berdiri saja, namun sudah berkembang ke luar wilayah negara mereka.

MNC merupakan perusahaan yang beroperasi dengan cara menawarkan hasil produk, pasaran, bangsa dan budaya di wilayah atau negara lain.[13] Dalam melakukan kegiatan usahanya, tujuan MNC tidak terlepas dari keuangan jangka panjang dan pendek. Tujuan keuangan jangka panjang yaitu untuk

[7]Muhammad Feriady, "Meniadakan Zero Sum Game Dalam Sebuah Kontestasi," Universitas Negeri Semarang, 28 Mei 2018 http://fe.unnes.ac.id/19/meniadakan-zero-sum-game-dalam-sebuah-kontestasi/

[8]C. Cristopher Baughn dan Attila Yaprak, "Economic Nationalism: Conceptual and Empirical Development," *International Society of Political Pyschology*, vol.3 no. 3 (2012), hlm. 764, https://www.jstor.org/stable/3792137?origin=crossref&seq=2#metadata_info_tab_contents

[9]*Ibid*, hlm. 760

[10] Edi W. Wibowo, *Loc.cit.*

[11]ACCESSTRADE, "Kelebihan dan Kekurangan Digital Economy,"18 November 2020 https://accesstrade.co.id/kelebihan-dan-kekurangan-digital-economy-1434

[12]*Ibid.*

[13]Jimmy L. Gaol, *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*(Jakarta: Grasindo,2008) hlm. 58.

kemakmuran bagi pemilik perusahaan, sedangkan tujuan jangka pendek yaitu untuk kelanjutan dan pengembangan usaha nya. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan yang berhasil memenangkan pasar persaingan dengan menawarkan produk maupun layanan yang berbasis daring. Diantara beberapa perusahaan tersebut perusahaan milik Amerika Serikat berhasil berada pada posisi teratas yang diantaranya adalah Google, Apple, Facebook dan Amazon. Dimana keempat perusahaan ini yang biasanya dijuluki GAFA berhasil meraup penghasilan yang sangat tinggi dengan perbandingan perdapatan sebagai berikut :

Perbandingan Pendapatan Perusahaan GAFA Tahun 2016-2020 (USD/Tahun)[14]

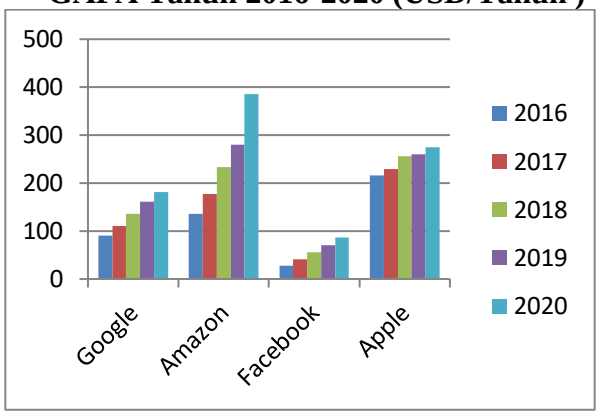

Google

Google merupakan sebuah perusahaan multinasional milik AS yang menawarkan pelayanan berbentuk jasa dan produk menggunakan Internet.[15] Pada saat ini google menjadi situs pencarian yang paling banyak digunakan di dunia, maka tidak heran Google memiliki pendapatan yang tinggi. pada tahun 2016 memiliki pendapatan sebesar US$ 90 Miliar, pada tahun 2017, sebesar US$ 110,5 Miliar, tahun 2018 US$ 136,4 Miliar, dan pada tahun 2019 yaitu sebesar US$ 160,7 Miliar.[16] Keuntungan yang didapat google sangat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dibidang digital.

Apple

Apple adalah sebuah perusahaan multinasional atau MNC yang berbasis teknologi yang terletak California, Amerika Serikat. Perusahaan ini merancang, mengembangkan serta melakukan penjualan barang elektronik, perangkat komputer dan perangkat keras seperti handphone dan lain-lain,serta juga memberikan layanan online. Pendapatan tahunan perusahaan Apple mencapai US$ 111,4 miliar pada tahun 2020 lalu,US$ 64 Miliar pada Kuartal ke-4 tahun 2019, dan US$ 53,5 Miliar pada Kuartal ke-3 tahun 2018 lalu.[17]

Facebook

Facebook merupakan perusahaan berbasis digital yang menawarkan layanan jejaring sosial bagi penggunanya. Perusahaan ini berpusat di California, Amerika Serikat yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004.[18] Pada tahun 2019 Facebook mampu meraup keuntungan sebesar 16,9 USD.[19]

Amazon

[14]J. Clement, "Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft (GAFAM) - statistics & facts," *Statista,* 4 Februari 2021 https://www.statista.com/topics/4213/google-apple-facebook-amazon-and-microsoft-gafam/#dossierSummary__chapter3

[15]Dwi A. Susanto, "Nama Google adalah Hasil Dari Salah Ejaan," *Merdeka Award*, 19 Agustus 2013 https://m.merdeka.com/teknologi/nama-google-adalah-hasil-dari-salah-ejaan-tekstory.html

[16]Andrea Lidwina, "Pendapatan Google Capai US$ 160,7 Miliar Sepanjang 2019," *Databoks,* 5 Februari 2020 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/pendapatan-google-capai-us-1607-miliar-sepanjang-2019

[17]Nurmayanti, "Pendapatan Apple Kalahkan Ekonomi Portugal dan Selandia Baru," *Liputan6,* 3 Agustus 2018https://www.liputan6.com/bisnis/read/3608623/pendapatan-apple-kalahkan-ekonomi-portugal-dan-selandia-baru

[18]Vizcardibe Audinovic, "Facebook," *Merdeka Award,* 19 juli 2013 https://m.merdeka.com/facebook/profil/

[19] CNBC Indonesia, "Pendapatan Facebook Tumbuh 28% di Q2-2019," 25 JULI 2019 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190725125232-8-87527/pendapatan-facebook-tumbuh-28-di-q2-2019

Amazon adalah perusahaan multinasional dalam bidang perdagangan berbasis online yang terbesar di dunia. menjalankan bisnisnya dengan mengandalkan teknologi yang berfokus pada e-commerce dan serta sebagai pembuat perangkat lunak.[20] Pada tahun 2019 pendapatan Amazon naik sebesar 21% menjadi US$ 281 Miliar.[21]

Kebijakan Digital Service Tax (DST) dan Respon Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Tersebut

Pada saat ini teknologi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. sehingga fenomena ini kemudian memunculkan masalah yang disebut pajak era digital.[22] Pajak digital merupakan pajak yang dikenakan pada perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet untuk menjalankan bisnisnya. Mulai dari penyedia konten digital hingga transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang disebut e-commerce.[23] Bentuk operasi dan produk perusahaan digital ini adalah menggunakan jaringan internet sebagai syarat utama nya. Saat ini konsensus mengenai perpajakan digital masih belum ada. Oleh karen itu, banyak negara-negara yang memutuskan untuk membuat kebijakan perpajakan digital dinegaranya secara unilateral. Salah satunya adalah negara Perancis.

Pada 6 Maret 2019 Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire merilis sebuah kerangka kerja bernama *Bill on the Taxation of Large Digital Companies* atau sering disebut *Digital Tax Service* (DST).[24] Pada tanggal 10 April 2019 senat Perancis untuk pertama kalinya membacakan UU proyek no.452 yang memperkenalkan DST. Tanggal 15 Mei 2019 senat Perancis merilis undang-undang DST.[25] Pada tanggal 26 Juni Senat Perancis bersama dengan Majelis Nasional menunjuk komisi bersama untuk menerbitkan teks No.616 yang didalamnya terdapat kesepakatan kompromi komisi tentang undang-undang pajak digital (DST) yang kemudian disahkan oleh dewan legislatif.[26] Lalu pada 24 Juli 2019, rancangan tersebut ditandatangani oleh presiden Perancis yaitu Emmanuel Macron dan akhirnya secara resmi diliris pada tangal 25 Juli 2019 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2019.[27]

Dalam pasal 299 undang-undang Pajak digital atau DST ini memberikan penetapan pajak pada perusahaan digital dengan tarif 3%. Tarif 3% ini menyasar kepada perusahaan digital yang memiliki pendapatan lebih dari €750 juta euro atau sebesar Rp11,37 triliun dari total seluruh pendapatannya diseluruh dunia dan sebesar €25 juta atau setara USD 28 juta untuk layanan yang ada di Perancis saja.[28] Pajak

[20] Tira Santia, "Jadi Miliarder Dunia,Tengok Cara Bos Amazon Kembangkan Usahanya," *Liputan6*, 02 Januari 2020 https://m.liputan6.com/bisnis/read/4146818/jadi-miliarder-dunia-tengok-cara-bos-amazon-kembangkan-usahanya

[21] We Online, "Kisah Perusahaan Raksasa: Amazon, Ritel Daring Bernilai USD1,6 T", *Warta Ekonomi.* 18 Agustus 2020. https://www.wartaekonomi.co.id/read299914/kisah-perusahaan-raksasa-amazon-ritel-daring-bernilai-usd16-t

[22] Kezia Rafinska, "Pajak di Era Digital, Serba-serbi & Tantangan Penerapannya," *Online Pajak,* 19 September 2019 https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/pajak-di-era-digital

[23] *Ibid.*

[24] Robert Sledz, "France: Senate and National Assembly Commission Reaches Agreement on Digital Services Tax Legislation," *Thomson Reusters Tax and Accounting,* 2 Juli 2019 https://tax.thomsonreuters.com/blog/france-senate-and-national-assembly-commission-reaches-agreement-on-digital-services-tax-legislation/

[25] *Ibid.*

[26] *Ibid.*

[27] *Ibid.*

[28] Nora G. C. Asmarani, "Rincian Skema Pajak Digital Prancis yang Terpaksa Ditunda Karena AS," *DDTC News,* 21 Januari 2020 https://news.ddtc.co.id/rincian-

layanan digital atau DST ini ditujukan kepada perusahaan teknologi atau digital yang memiliki pengguna atau pelanggan di negara Perancis. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka dapat diketahui bahwa dalam aturan pemajakan Perancis tidak lagi mempertimbangkan kehadiran fisik perusahaan tersebut.

Terdapat dua jenis layanan digital di dalam undang-undang DST ini. Yang pertama adalah layanan yang penggunanya memiliki akses untuk berinteraksi atau berhubungan dengan pengguna layanan yang lain atau disebut juga dengan *Interfacing Service.* Contohnya adalah antara penjual dan pembeli yang melakukan interaksi dalam sebuah marketplace. Sedangkan yang kedua adalah layanan periklanan atau *Advertising Service.*[29] Layanan ini ditujukan kepada para pengiklan yang membeli ruang iklan, serta manajemen dan transmisi dari data pengguna. Namun terdapat beberapa layanan digital yang secara eksplisit mendapat pengecualian dari skema perpajakan ini. Contohnya pada penyedia konten digital seperti streaming untuk musik dan layanan komunikasi. Lalu layanan pembayaran seperti asuransi, perbankan dan lain-lain.

Pada saat ini perusahaan raksasa teknologi di seluruh dunia hanya membayar pajak yang sedikit, bahkan di beberapa negara perusahaan raksasa teknologi tersebut tidak membayar pajak sedikitpun karena tidak memiliki kehadiran fisik. Penghindaran pajak ini dikarenakan banyak perusahaan teknologi yang mengaku bahwa pendapatan terbesarnya berasal dari negara tempat kantor pusatnya berdiri.

DST ditujukan kepada perusahaan domestik maupun perusahan asing aktivitasnya tercakup dalam DST dan mempunyai penghasilan yang lebih dari ambang batas yang telah ditentukan. Tarif pajak digital sebesar 3% ini sudah bersifat final dan mulai akan diberlakukan pada 1 januari 2019. Terdapat setidaknya 4 perusahaan yang saat ini menjadi sasaran bagi kebijakan DST. Perusahaan tersebut adalah raksasa teknologi milik Amerika Serikat yaitu Google, Apple, Facebook dan Amazon atau yang biasa disebut GAFA. Jika dilihat dari angka pendapatannya masing-masing pada data di point 2.4 diatas, perusahaan tersebut memiliki pendapatan sangat tinggi dan jauh melebihi ambang batas yang telah ditetapkan Perancis.

Dengan adanya kebijakan ini AS sangat merasa dirugikan. Donald Trump selaku presiden yang menjabat di AS saat itu memberikan ancaman kepada Perancis jika tetap melakukan tindak diskriminatif tersebut kepada perusahaan miliknya. Pada tanggal 10 Juli 2020, Donald Trump mengumumkan akan mengenakan bea masuk baru terhadap barang-barang asal Perancis seperti kosmetik, tas dan produk impor lainnya sebesar 25%. Besaran impor produk dari Perancis yang diincar pemerintah AS saat itu adalah senilai US$1,3 miliar atau setara Rp 18,2 triliun.[30] tetapi penerapan aturan bea masuk ini langsung ditunda selama 180 hari.

AS melakukan penyelidikan terkait kebijakan DST Perancis ini untuk membuktikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak diskriminatif terhadap perusahaan raksasa teknologi miliknya. Terdapat setidaknya 10 negara yang menjadi incaran penyelidikan AS terkait penerapan pajak digital ini. Penyelidikan ini diberi nama

skema-pajak-digital-prancis-yang-terpaksa-ditunda-karena-as-18499?page_y=518

[I] *Ibid.*

[30] CNBC Indonesia, "AS & Prancis di Ambang Perang Dagang Gegara Pajak Netflix Cs," 13 Juli 2020 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200713160856-37-172312/as-prancis-di-ambang-perang-dagang-gegara-pajak-netflix-cs

"section 301".[31] "Section 301" merujuk dari peraturan amerika serikat yaitu US TRADE ACT 1974. Didalamnya disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat diberikan wewenang untuk mengambil semua tindakan yang sesuai, termasuk pembalasan berbasis tarif maupun non-tarif, agar mendapatkan penghapusan tindakan, kebijakan, atau praktik dari pemerintah asing yang melanggar perjanjian perdagangan internasional atau tidak dapat dibenarkan, tidak masuk akal, atau diskriminatif, serta membebani atau membatasi perdagangan AS, dimana penyelesaiannya dilakukan dengan upaya negosiasi dalam bentuk kompensasi atau penghapusan hambatan.[32]

AS melakukan penyelidikan karena AS menganggap terdapat kecenderungan bahwa kebijakan DST ini, hanya menyasar perusahaan raksasa digital AS. Terdapat pula beberapa argumen yang memperkuat dakwaan dari AS ini. Yang pertama yaitu pernyataan dari pihak otoriter Perancis yang menyebutkan secara terang-terangan bahwa DST itu sendiri sebenarnya merupakan GAFA TAX. GAFA sendiri merupakan singkatan nama dari raksasa teknologi milik AS yaitu Google, Apple, Facebook dan Amazon.[33] Argumen ini didukung dengan temuan AS bahwa penerapan DST bukan berdasarkan pada penghasil netto atau income melainkan atas penghasilan bruto. Oleh karena itu, AS menganggap bahwa penerapan DST ini bertentangan dengan prinsip perpajakan internasional, dan didalam DST tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila konsensus pajak digital sudah tercapai maka DST akan dihapuskan.

Penundaan 180 hari terhadap Penerapan bea masuk untuk produk Perancis ditunda karena sebelumnya Perancis juga melakukan penangguhan terhadap penerapan pajak digital hingga akhir tahun 2020. Kedua negara telah sepakat untuk melakukan negosiasi terkait kebijakan pajak digital ini dengan difasilitasi oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD. Tujuannya adalah agar kedua negara dapat menemukan solusi yang tepat atas perselisihan pajak digital ini. Namun negosiasi yang dilakukan kedua belah tidak tidak membuahkan hasil, sehingga AS memutuskan untuk mundur dari negosiasi dan melanjutkan penyelidikannya terkait tindakan diskriminasi kebijakan pajak digital terhadap perusahaan miliknya.

Berdasarkan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh pihak AS, AS menyimpulkan bahwa kebijakan DST Perancis memang sebagai bentuk diskriminasi kepada perusahaan milik AS. Karena Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari negosiasi terkait pajak digital, maka Perancis tetap bersikeras akan memulai pemungutan pajak digital yang sudah disahkan tersebut pada pertengahan Desember.

ALASAN PERANCIS TETAP MEMBERLAKUKAN DIGITAL SERVICE TAX

Alasan pemberlakuan DST ini adalah untuk menetapkan kekosongan hukum saat ini agar para pelaku ekonomi digital tidak memanfaatkan kekosongan yang ada sebagai peluang untuk meraup keuntungan yang besar tanpa membayar pajak. Selain itu, terdapat beberapa alasan lain yang membuat Perancis tetap bertekad untuk menjalankan kebijakan DST tersebut meskipun telah mendapatkan ancaman dari AS, yaitu :

[31]CNBC Indonesia, "Trump Selidiki Pajak Digital Prancis, Ada Apa?," 11 Juli 2019 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190711143035-37-84212/trump-selidiki-pajak-digital-prancis-ada-apa

[32]Robert E. Lighthizer, "Report on France's Digital Services Tax Prepared in the Investigation under Section 301 of the trade Act of 1974," *United States Trade Representative,* 2 Desember 2019, hlm. 8

[33]Dea Yustisia, "Membedah Dakwaan Diskriminatif AS atas Pajak Digital Prancis," *DDTC News,* 12 Juni 2020 https://news.ddtc.co.id/membedah-dakwaan-diskriminatif-as-atas-pajak-digital-prancis-21537

1. **Potensi Keuntungan yang diperoleh Perancis dari Pemungutan Pajak Digital**

Dengan diterapkan pajak digital, pemerintah Perancis telah memperkirakan bahwa pemasukan bagi negaranya akan meningkat setidaknya 500 juta euro pada tahun pertama penerapan kebijakan ini. Sehingga pemerintah Perancis tidak perlu mengurangi bantuan kesejahteraan bagi warganya. Pada tahun pertama penerapannya, kas negara Perancis telah mengantongi sekitar 400 Juta euro dari pajak digital sebesar 3%.[34] Pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan € 600 juta euro setiap tahun.[35]

1. **Perancis Mendapatkan Dukungan dari Negara-Negara Uni Eropa**

Paris tidak sendirian di antara ibu kota Eropa dalam mengusulkan pajak atas teknologi besar. Inggris, Spanyol, Italia, Austria, Meksiko, dan Kanada juga telah mengumumkan rencana pungutan digital mereka sendiri. Komisioner Perdagangan UE Phil Hogan berjanji untuk mendukung hak negara itu untuk meloloskan aturan pajak digital domestik. Komisi Eropa akan berdiri bersama dengan Perancis dan semua negara anggota yang ingin memiliki hak berdaulat untuk memberlakukan pajak digital pada perusahaan dengan cara yang adil," kata Hogan awal bulan ini dalam konferensi pers bersama dengan Le Maire.[36] Rencana aksi unilateral perpajakan digital ini sudah berlaku pada beberapa negara di Uni Eropa dan jumlahnya semakin meningkat. Beberapa negara yang memberikan dukungan kepada Perancis dengan mengikuti peraturan Perancis yaitu menetapkan pajak digital untuk perusahaan multinasional teknologi yang berada di negaranya. Beberapa negara tersebut antara lain adalah Inggris, Italia, Spayol, Austria, Republik Ceko.

2. **Uni Eropa Memberikan Dukungan dengan Mempersiapkan Proposal Pajak Digital**

Uni eropa saat ini juga telah menyiapkan proposal yang berkaitan dengan pajak layanan digital yang akan berlaku untuk seluruh negara anggotanya. Proposal tersebut dipersiapkan Uni Eropa sebagai bentuk antisipasi jika nanti proses yang dijalankan OECD masih belum dapat merumuskan konsensus global bagi pajak digital tersebut. Proposal ini bertujuan untuk dapat mengakomodasi negara-negara anggota Uni Eropa yang sudah mempunyai kerangka hukumnya sendiri dalam memberlakukan kebijakan DST seperti Perancis, Spanyol, Italia dan lainnya. Proposal tersebut rencananya akan siap pada kuartal pertama tahun 2021.[37]

Rancangan pajak digital yang direncanakan Uni Eropa adalah dengan menawarkan dua aspek atas tantangan perpajakan pada perusahaan digital. Yang pertama, tambahan penerimaan yang didapatkan dari negara anggotanya. Sedangkan yang kedua adalah berupa jaminan kesetaraan pada perlakuan perpajakan antara bisnis digital dengan konvensional. Pada awalnya, estimasi penerapan pajak digital yang dikhususkan di wilayah Uni Eropa akan memberikan penerimaan pajak tambahan miliran hingga puluhan miliar euro. Tambahan penerimaan pajak yang didapat

[34]Friska Yolandha, "Prancis Lanjutkan Kebijakan Pajak ke Perusahaan Teknologi," *Republika,* 27 November 2020 https://www.republika.co.id/berita/qkfx7l370/prancis-lanjutkan-kebijakan-pajak-ke-perusahaan-teknologi

[35]Sophie Dorin, "Digital Service Tax in France," *Bird and Bird,* Oktober 2019 https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/digital-services-tax-in-france

[36]Mark Scott and Elisa Braun, "How the US made France blink on digital tax," *Politico* (23 januari 2020) https://www.politico.eu/article/how-the-us-made-france-blink-on-digital-tax-bruno-le-maire-donald-trump-emmanuel-macron-google-facebook-tariffs/

[37]Doni Agus Setiawan, "Maret 2021, Para Pemimpin Uni Eropa Bakal Membahas Pajak Digital," *DDTC News* (13 Oktober 2020) https://news.ddtc.co.id/maret-2021-para-pemimpin-uni-eropa-bakal-membahas-pajak-digital---24698?page_y=1275

negara anggota ini akan berbeda-beda karena ditentukan oleh beberapa faktor, seperti dimana tempat pajak dipungut, tarif perpajakan, serta tingkat pertumbuhan pada kegiatan usaha di negara anggota tersebut.[38] Proposal pajak digital di Uni Eropa ini merupakan alternatif kebijakan yang di rancang Uni Eropa jika pembahasan konsensus global di bawah koordinasi OECD kembali mengalami kebuntuan pada pertengahan tahun ini. Jika kesepakatan internasional tidak bisa dicapai, aksi unilateral pajak digital yang berlaku untuk seluruh negara anggota sudah siap untuk dijalankan Uni Eropa.

Valdis Dombrovskis selaku Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa menyatakan bahwa proposal pajak digital yang akan berlaku untuk seluruh negara anggotanya telah siap untuk dirilis, menurutnya proposal pajak digital ini juga akan menjadi sangat penting. Ia menilai bahwa konsolidasi kebijakan pajak digital ini juga merupakan hal yang mendesak yang harus segera dilakukan guna mencegah distorsi kebijakan antar negara anggota dalam pengimplementasiannya di pasa tunggal Uni Eropa. Apalagi beberapa negara anggota telah terlebih dahulu menjalankan kebijakan pajak digitalnya secara unilateral karena telah mendapatkan persetujuan politik di parlemen nya seperti Perancis. Proposal pajak digital ini juga menjadi upaya dari organisasi untuk memastikan agar para perusahaan digital multinasional membayar pajak secara adil atas operasionalnya di pasar Eropa.[39]

[38]Doni Agus Setiawan, "Buat Antisipasi, Parlemen Minta Proposal Pajak Digital Dibahas," *DDTC News* (29 April 2021) https://news.ddtc.co.id/buat-antisipasi-parlemen-minta-proposal-pajak-digital-dibahas-29511

[39]Doni Agus Setiawan, "Pasang Posisi, Uni Eropa Siap Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital," *DDTC News* (21 Oktober 2020) https://news.ddtc.co.id/pasang-posisi-uni-eropa-siap-lancarkan-aksi-unilateral-pajak-digital-24918

KESIMPULAN

Salah satu negara yang telah melakukan tindakan unilateral terkait pajak digital adalah Perancis. Di Uni Eropa, Perancis merupakan negara pertama yang memutuskan untuk menetapkan pajak layanan digital kepada perusahaan teknologi berbasis digital yang disebut dengan Digital Service Tax (DST). Sederhananya, DST merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan kotor yang diterima suatu perusahaan digital. Penerapan kebijakan DST oleh Perancis ini menimbulkan respon negatif dari negara adidaya Amerika Serikat. Kebijakan ini dianggap sebagai tindakan diskriminatif oleh AS karena mayoritas perusahaan digital yang memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi berasal dari Amerika Serikat, seperti Google, Apple, Facebook dan Amazon atau yang biasa disebut dengan GAFA. AS merasa sangat dirugikan dengan adanya kebijakan ini. Untuk itu Donald Trump yang saat itu menjabat sebagai presiden AS memutuskan untuk mengenakan bea masuk sebesar 25% atas produk impor Perancis seperti kosmetik, tas mewah dan juga sabun. Meskipun begitu Perancis tetap bersikeras untuk memberlakukan kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi Perancis untuk tetap melakukan pemungutan pajak dari perusahaan digital. Yang pertama, yaitu adanya tekanan politik dari negaranya seperti aksi protes yang dilakukan masyarakatnya terkait undang undang kenaikan BBM dan merambat ke hal lainnya. Dengan adanya pemasukan dari pajak digital ini dapat membantu pemerintah Perancis untuk merehabilitasi ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, yaitu karena adanya pandemi covid-19 yang membuat perekonomian Perancis anjlok sebesar 27%, sehingga Perancis membutuhkan keuntungan dari pajak digital ini untuk membantu memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah. Yang ketiga, yaitu adanya

dukungan dari negara negara Uni Eropa dengan ikut serta menerapkan kebijakan DST ini secara unilateral di negara. Spanyol, Italia dan negara lainnya merasa perlu untuk mengikuti langkah Perancis karena selama ini perusahaan digital belum membayar pajak sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu, proposal yang berkaitan dengan kebijakan layanan digital yang telah dipersiapkan oleh Uni Eropa untuk menyokong negara anggotanya yang telah menetapkan kebijakan pajak digital secara unilateral. Proposal ini dibuat sebagai bentuk antisipasi jika OECD belum mampu untuk menemukan konsensus global terkait perpajakan digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akbar, Muhammad Aldin, dan Siti Nur Alam. *Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*.

Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Burchill, Scott, dan Andrew Linklater. *Teori Hubungan Internasional*. Dialihbahasakan oleh Muhammad Sobirin. Bandung: Nusa Media, 2008.

Budiarta, Kustoro. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Febrianty. *Manajemen Perubahan Perusahaan Di Era Transformasi Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Khristianto, Wheny. *Sistem Informasi Manajemen*. Jember: Jember University Press, 2015.

Masoed, Mochtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES, 1994.

Mansyur, Nawir. *Manajemen Valuta Asing Dasar Keputusan Keuangan Perusahaan Multinasional*. Klaten: CV. Penerbit Lakeisha, 2019.

Nugroho, Riant. Publick Policy. Jakarta: Gramedia, 2017.

Suandy, Erly. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Sudibyo, Agus. Jagat Digital Pembebasan dan Penguasaan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.

Tapscott, Don. *The Digital Economy*. New York: McGraw Hill, 1995.

Jurnal

Baughn, Cristopher, dan Attila Yaprak. "Economic Nationalism: Conceptual and Empirical Development." *International Society Of Political Psychology* Vol.3 No.3, 2012: 759-778.

Kartikasari, Novia Dessy, Kadarisman Hidayat, dan Edy Yulianto. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan Multinasional (Survei Pada Konsumen Unilever di Indonesia Mengenai Program Project Sunlight PT Unilever Indonesia Tbk." *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol.43 No.1, 2017: 8-16.

Olivia, Y. "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Transnasional* Vol.5 No.1, 2013: 897-900.

Pryke, Sam. "Economi Natiolism: Theory, History and Prospect." *Global Policy* Vol.3 No.3, 2012: 281-291.

Q.N, Chusnul. "Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018." *Lex Scientia Law Review* Vol.3 No.2, 2018: 143-154.

Rodhin, Roni. "Internet Dalam Konteks Perpustakaan." *Pustakaloka*, 2012: 1-18.

Setiyani, Rediana. "Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar ." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan* Vol.5 No.2, 2010: 117-133.

Tiraada, Tryana A.M. "Kesadaran Perpajakan Sanksi Pajak. Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3, 2013: 999-1008.

Wibowo, Edi W. "Analisis Ekonomi DIgital dan Keterbukaan Terhadap Pertumbuhan

GDP Negara ASEAN." *Jurnal Lentera Bisnis*, 2018: 66-80.

Website

Accesstrade. *Kelebihan dan Kekurangan Digital Ekonomi.* 18 November 2020. https://accesstrade.co.id/kelebihan-dan-kekurangan-digital-economy-1434 (diakses Maret 11, 2021).

Adiwijaya, Setiawan. "Facebook Setuju Bayar Pajak Ke Prancis 106 Juta Euro." *Tagar.id.* 25 Agustus 2020. https://www.tagar.id/facebook-setuju-bayar-pajak-ke-prancis-106-juta-euro (diakses Mei 20, 2021).

Administrator. "AS Menawarkan Rencana Baru Dalam Pembicaraan Pajak Perusahaan Global." *Center For Indonesia Taxation Analysis.* https://cita.or.id/as-menawarkan-rencana-baru-dalam-pembicaraan-pajak-perusahaan-global/ (diakses Mei 21, 2021).

Alliston, Michael. "The UK's Digital Services Tax: What's New." *Norton Rose Fulbrught.* Mei 2020. https://www.politico.eu/article/how-the-us-made-france-blink-on-digital-tax-bruno-le-maire-donald-trump-emmanuel-macron-google-facebook-tariffs/ (diakses Mei 24, 2021).

Amalia, Happy Amanda. "Prancis Akan Berlakukan Pajak Digital Tahun Ini." *Investor.id.* 26 November 2020. https://investor.id/international/prancis-akan-berlakukan-pajak-digital-tahun-ini (diakses Mei 24, 2021).

"Amazon Bebankan Pajak Digital Prancis Ke Pengguna Platformnya." *DDTC News.* 2 Agustus 2019. https://news.ddtc.co.id/amazon-bebankan-pajak-digital-prancis-ke-pengguna-platformnya-16618 (diakses Mei 20, 2021).

Asmarani, Nora G. C. "Rincian Skema Pajak Digital Prancis Yang Terpaksa Ditunda Karena AS." *DDTC News.* 21 Januari 2020. https://news.ddtc.co.id/rincian-skema-pajak-digital-prancis-yang-terpaksa-ditunda-karena-as-18499?page_y=518 (diakses April 13 , 2021).

—. "Sinak, Ini Deretan Negara Yang Tempuh Aksi Unilateral Pajaki Google CS." *DDTC News.* 22 Januari 2020. https://news.ddtc.co.id/simak-ini-deretan-negara-yang-tempuh-aksi-unilateral-pajaki-google-cs-18511 (diakses April 13, 2021).

Audivonic, Vizcardibe. *Facebook.* 19 Juli 2013. https://m.merdeka.com/facebook/profil/ (diakses Maret 13, 2021).

"Austria Digital Services Tax." *Global VAT Compliance.* 16 April 2021. https://www.globalvatcompliance.com/austria-digital-services-tax/ (diakses Mei 25, 2021).

Clement, J. "Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft (GAFAM) - statistics & facts." *Statista.* 4 Februari 2021. https://www.statista.com/topics/4213/google-apple-facebook-amazon-and-microsoft-gafam/#dossierSummary__chapter3 (diakses Juni 22, 2021).

CNBC Indonesia. *AS dan Prancis di Ambang Perang Dagang Gegara Pajak Netflix CS.* 13 Juli 2020. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200713160856-37-172312/as-prancis-di-ambang-perang-dagang-gegara-pajak-netflix-cs (diakses April 14, 2021).

Daholi, Qivi Hady. "Menyigi Proposal OECD Dalam Pemajakan Ekonomi Digital." *DJP.* 30 Maret 2021. https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyigi-proposal-oecd-dalam-pemajakan-ekonomi-digital (diakses April 10, 2021).

DDTC News. *Berbagai Definisi Pajak, Simak di Sini.* 5 April 2020. https://news.ddtc.co.id/berbagai-definisi-

pajak-simak-di-sini-20043?page_y=600 (diakses Maret 25, 2021).

Dorin, Sophie. "Digital Service Tax In France." *Bird and Bird.* Oktober 2019. https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/digital-services-tax-in-france (diakses Mei 24, 2021).

Dsy. "Prancis Mulai Tekan Facebook dan Amazon Bayar Pajak." *Jernih.co.* 27 September 2020. https://jernih.co/oikos/prancis-mulai-tekan-facebook-dan-amazon-bayar-pajak/ (diakses Mei 3, 2021).

Dwi Andi Susanto. 19 Agustus 2013. https://m.merdeka.com/teknologi/nama-google-adalah-hasil-dari-salah-ejaan-tekstory.html (diakses Maret 12, 2021).

Fauzia, Mutia. "Soal Pajak Digital, Prancis Akhirnya Buat Kesepakatan Dengan AS." *Kompas.* 27 Agustus 2019. https://money.kompas.com/read/2019/08/27/073900226/soal-pajak-digital-perancis-akhirnya-buat-kesepakatan-dengan-as-?page=all (diakses April 15, 2021).

Gaol, Jimmy L. *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi.* Jakarta: Grasindo, 2008.

Hafidh. "Selain Indonesia, Ini Penerapan Pajak Global Negara Lain." *Klikpajak.* 17 Juni 2020. https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/penerapan-pajak-digital-global/ (diakses Mei 24, 2021).

Handoyo. "Google Bayar Pajak Sekitar US 1 miliyar Untuk Selesaikan Kasus pajak Prancis." *Kontan.* 13 September 2019. https://internasional.kontan.co.id/news/google-bayar-sekitar-us-1-miliar-untuk-selesaikan-kasus-pajak-di-prancis (diakses Mei 21, 2021).

Hardiningsih, Pancawati. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2011: 127.

Hariani, Aprilia. "Aksi Global Menangkal Penghindaran Pajak." *Majalah Pajak.* 23 Juli 2019. https://majalahpajak.net/aksi-global-menangkal-penghindaran-pajak/ (diakses April 12, 2021).

Heriady, Muhammad. "MENIADAKAN ZERO SUM GAME DALAM SEBUAH KONTESTASI ." *Universitas Negeri Semarang Fakultas Ekonomi.* 28 Mei 2018. http://fe.unnes.ac.id/19/meniadakan-zero-sum-game-dalam-sebuah-kontestasi/ (diakses Desember 25, 2020).

Heri. Pengertian Teknologi: Sejarah, Perkembangan, Manfaat & Contoh Teknologi Terbaru. 25 Februari 2018. https://salamadian.com/perkembangan-pengertian-teknologi/ (diakses Desember 11, 2020).

Internet Live Stats. France Internet Users. 1 July 2016. https://www.internetlivestats.com/internet-users/france/ (diakses September 22, 2020).

Indonesia, CNBC. *Pendapatan Facebook Tumbuh 28% di Q2-2019.* 25 Juli 2019. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190725125232-8-87527/pendapatan-facebook-tumbuh-28-di-q2-2019 (diakses Maret 13, 2021).

Junus, Hakam. *Negara, Perang dan Ketimpangan Ekonomi Antar Negara: Kacamata Ilmu HI.* 7 Agustus 2019. https://kumparan.com/hakam-work/negara-perang-dan-ketimpangan-ekonomi-antar-negara-kacamata-ilmu-hi-1rcMVO2PbLE (diakses Desember 25, 2020).

Kami, Indah Mutiara. "Kronologi 4 Aksi Protes Rompi Kuning Yang Bikin Prancis Bergejolak." *Detik News.* 9 Desember 2018. https://news.detik.com/internasional/d-4335354/kronologi-4-aksi-protes-rompi-kuning-yang-bikin-prancis-bergejolak (diakses Mei 23, 2021).

Kurniati, Dian. “Soal Usulan Amerika Serikat Terkait Safe Harbour, Ini Respon DJP.” *DDTC News.* 3 Maret 2020. https://news.ddtc.co.id/soal-usulan-amerika-serikat-terkait-safe-harbour-ini-respons-djp-19298 (diakses Mei 21, 2021).

Kusumawadhani, Amanda. “Ini 10 Negara Yang Rugi Besar Akibat Covid-19.” *Bisnis.com.* 23 Agustus 2020. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200823/12/1282003/ini-10-negara-yang-rugi-besar-akibat-covid-19 (diakses Mei 23, 2021).

Lidwina, Andrea. *Pendapatan Google Capai US$160,7 Miliar Sepanjang 2019.* 5 Februari 2020. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/pendapatan-google-capai-us-1607-miliar-sepanjang-2019 (diakses Maret 12 , 2021).

Lighthizer, Robert E. “Report Of France's Digital Services Tax Prepared in The Investigation Under Section 301 Of Trade Act of 1974.” *United States Trade Representative*, 2019: 1-119.

Lubis, Arief Hakim P. “Mengakselerasi Kebijakan Pajak Ekonomi DIgital.” DDTC News. 11 Agustus 2020. https://news.ddtc.co.id/mengakselerasi-kebijakan-pajak-ekonomi-digital-23023 (diakses November 26, 2020).

Mahjoubi, Mounir. *Twitter.* 18 Desember 2018. https://twitter.com/mounir/status/1075054049114972160. (diakses Mei 2, 2021).

Maire, Bruno Le. *Pidato Parlemen Eropa.* 19 Oktober 2018. https://www.europe1.fr/economie/taxation-des-gafa-la-france-peut-elle-convaincre-ses-partenaires-europeens-3784523. (diakses Mei 2, 2021).

Maire, Bruno Le. “Twitter.” 27 Maret 2018. https://twitter.com/brunolemaire/status/978713609697185792?lang=en. (diakses Mei 2, 2021).

Mchoney, Doug. “Italy Draft 2020 Budget Calls For Unilateral Digital Services Tax.” *PWC United States.* November 2019. https://www.pwc.com/us/en/services/tax/library/insights/italy-draft-2020-budget-calls-for-unilateral-digital-services-ta.html (diakses Mei 24, 2021).

Meliala, Tulis Sembiring, dan Fransisca Widianti Oetomo. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak.* Jakarta: Semesta Media, 2008.

News, Redaksi DDTC. “Diancam AS, Prancis Tidak Gentar Tetap Terapkan Pajak Digital.” *DDTC News.* 17 Juli 2019. https://news.ddtc.co.id/diancam-as-prancis-tidak-gentar-tetap-terapkan-pajak-digital-16433?page_y=648 (diakses Mei 25, 2021).

News, Redaksi DDTC. “Begini Rencana Pajak Digital di Prancis, Inggris dan Spanyol.” *DDTC News.* 31 Januari 2019. https://news.ddtc.co.id/begini-rencana-pajak-digital-di-prancis-inggris--spanyol-14874 (diakses Mei 2? ?021).

Nurmayanti. *Pendapatan .pple Kalahkan Ekonomi Portugal dan Selandia Baru.* 3 Agustus 2018. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3608623/pendapatan-apple-kalahkan-ekonomi-portugal-dan-selandia-baru (diakses Maret 12, 2021).

Pranata, Anugrah Yogi. *Apple.* 23 September 2015. https://m.merdeka.com/apple/profil/ (diakses Maret 12, 2021).

“Prancis: Usulan AS Untuk Buka Kembali Negosiasi Pajak Global Menarik.” *Antara News.com.* 9 April 2021. https://www.antaranews.com/berita/2090538/prancis-usulan-as-untuk-buka-kembali-negosiasi-pajak-global-menarik (diakses Mei 22 , 2021).

Pratomo, Yudha. “Mengenal Alphabet, Induk Google yang Dipimpin Sundar Pichai.” *Kompas.com.* 4 Desember 2019.

https://tekno.kompas.com/read/2019/12/04/20420047/mengenal-alphabet-induk-google-yang-dipimpin-sundar-pichai?page=all (diakses Juni 22, 2021).

Rafinska, Kezia. "Pajak di Era Digital, Serba-serbi dan Tantangan Penerapannya." *Online Pajak*. 19 September 2019. https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/pajak-di-era-digital (diakses Maret 25, 2021).

Safarina, Hamida A. "Mengulas Implementasi 15 Aksi BEPS di Berbagai Negara." *DDTC News*. 15 September 2020. https://news.ddtc.co.id/mengulas-implementasi-15-aksi-beps-di-berbagai-negara-23935?page_y=2332 (diakses April 11, 2021).

Santia, Tira. "Jadi Miliarde Dunia, Tengok Cara Bos Amazon Kembangkan Usahanya." *Liputan 6*. 2 Januari 2020. https://m.liputan6.com/bisnis/read/4146818/jadi-miliarder-dunia-tengok-cara-bos-amazon-kembangkan-usahanya (diakses Maret 13, 2021).

Scott, Mark, dan Elisa Braun. "How The US Made France Blink On Digital Tax." *Politico*. 23 Januari 2020. https://www.politico.eu/article/how-the-us-made-france-blink-on-digital-tax-bruno-le-maire-donald-trump-emmanuel-macron-google-facebook-tariffs/ (diakses Mei 24, 2021).

Sebayang, Rehiya. "Gegara Corona, Aktivitas Ekonomi Prancis Turun 27% di April." *CNBC News*. 12 Mei 2020. https://news.ddtc.co.id/pajak-digital-segera-diterapkan-prancis-curi-start--21001 (diakses Mei 23, 2021).

Setiawan, Doni Agus. "Buat Antisipasi, Parlemen Minta Proposal Pajak Digital Dibahas." *DDTC News*. 29 April 2021. https://news.ddtc.co.id/buat-antisipasi-parlemen-minta-proposal-pajak-digital-dibahas-29511 (diakses Mei 25, 2021).

—. "Maret 2021, Para pemimpin Uni Eropa Bakal Membahas Pajak Digital." *DDTC News*. 13 Oktober 2020. https://news.ddtc.co.id/maret-2021-para-pemimpin-uni-eropa-bakal-membahas-pajak-digital---24698?page_y=1275 (diakses Mei 24, 2021).

—. "Pajak Digital Segera Diterapkan, Prancis Curi Start." *DDTC News*. 19 Mei 2020. https://news.ddtc.co.id/pajak-digital-segera-diterapkan-prancis-curi-start--21001 (diakses Mei 23, 2021).

—. "Pasang Posisi,Uni Eropa Siap Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital." *DDTC NEws*. 21 Oktober 2020. https://news.ddtc.co.id/pasang-posisi-uni-eropa-siap-lancarkan-aksi-unilateral-pajak-digital-24918?page_y=969 (diakses Mei 25, 2021).

—. "Prancis Mulai Tagih Pajak Digital Ke Facebook dan Amazon." *DDTC News*. 26 November 2020. https://news.ddtc.co.id/pajak-digital-segera-diterapkan-prancis-curi-start--21001 (diakses Mei 23, 2021).

—. "Ikuti Prancis dan Austria, Ceko Ajukan RUU Pajak Digital ke Parlemen." *DDTC News*. 8 September 2019. https://news.ddtc.co.id/ikuti-prancis-dan-austria-ceko-ajukan-ruu-pajak-digital-ke-parlemen-17015 (diakses Mei 22, 2021).

Setyawan, Doni Agus. "@ Menteri Keuangan Ini Dukung Seruan AS Soal Pajak Minimum Global." *DDTC News*. 28 April 2021. https://news.ddtc.co.id/2-menteri-keuangan-ini-dukung-seruan-as-soal-pajak-minimum-global-29483 (diakses Mei 21, 2021).